BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Koperasi dan Karakteristiknya

Menurut **Sumarsono, (2009: 5):**

"Sejarah koperasi lahir pada permulaan abad ke-19 sebagai suatu reaksi terhadap sistem perekonomian kapitalisme di Negara-negara Eropa. Sistem ekonomi ini bersendi pada kebebasan individu untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin. Akibatnya kelompok-kelompok tertentu yakni kaum kapitalis, menguasai kehidupan masyarakat luas. Mereka hidup berlebihan, sedang masyarakat yang tidak memiliki modal makin tertindas. Pada saat itulah tumbuh aliran kebersamaan yang menetang aliran individualisme ini dengan asas kebersamaan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Bentuk kerjasama ini melahirkan suatu perkumpulan yang dinamakan koperasi''.

Menurut **Moh. Hatta dalam Sumarsono (2009:5):**

"Istilah koperasi sebenarnya berasal dari bahasa asing yaitu Co-Operation; dimana Co berarti bersama dan Operation berarti usaha. Secara harfiah koperasi dapat diartikan sebagai usaha bersama. Pengertian ini juga dapat diaplikasikan secara sederhana misalnya KUD (Koperasi Unit Desa) sebagai usaha bersama suatu kelompok masyarakat di suatu wilayah desa, KOPKAR (Koperasi Karyawan) sebagai usaha bersama karyawan yang bekerja bersama dalam satu institusi, lembaga atau perusahaan.''

Menurut **Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992:**

"Koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal tersebut menjelaskan dalam koperasi harus ada prinsip-prinsip koperasi sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan perkoperasian tersebut. Yang paling penting dalam pengertian ini adalah bahwa koperasi merupakan badan usaha yang berdiri atas asas kekeluargaan, berbeda dengan badan usaha lain, yang melandasi kegiatan usahanya hanya untuk mencari laba''.

Menurut **Moh. Hatta dalam Sumarsono (2003:3)**,

“Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi di dahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan’’.

2.1.2 Jenis Koperasi

Arifinal Chaniago, (2008: 7):

“Dalam koperasi dimensi kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijaksanaan usaha berada pada para anggota, melalui alat kelengkapan koperasi yang dinamakan Rapat Anggota Tahunan. Sedangkan dalam badan usaha non koperasi kekuasan tertinggi berada pada para pemegang saham’’.

Menurut Sumarsono, (2009: 5):

“Dalam koperasi sektor usaha yang ditujukan kepada dua sektor, yaitu sektor intern dan ekstern, artinya koperasi tidak hanya mencari keuntungan untuk koperasi tersebut saja tetapi juga memeperhatikan kesejahteraan anggotanya. Hal ini berbeda dengan badan usaha lainnya yang hanya memperhatikan sektor ekstern saja. Dalam koperasi tujuan didirikannnya usaha adalah untuk memberikan pelayanan, sedangkan untuk usaha non-koperasi adalah untuk mencari keuntungan semata. Karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda *(the dual identify of the member)*, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi *(user own oriented firm)*’’.

Tujuan koperasi Indonesia dalam **Undang-undang No 25 Tahun 1992 pasal 3:**

“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dari tujuan tersebut, koperasi dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, berdasarkan kepentingan anggota dan usaha utamanya, koperasi di golongkan menjadi empat jenis, yaitu: Koperasi konsumen, koperasi produsen,

koperasi simpan pinjam dan koperasi pemasaran. Sedangkan berdasarkan hierarki organisasinya, koperasi digolongkan menjadi koperasi dan koperasi sekunder''.

Menurut **Penulis** berdasarkan berbagai pendapat para ahli di atas dapat mengambil kesimpulan mengenai pengertian koperasi, yaitu;

"Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan".

2.1.3 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

Tahun pajak 2011 adalah tahun pajak pertama kali bagi mayoritas wajib pajak untuk membuat Laporan Keuangan berdasarkan SAK ETAP yang mulai berlaku efektif per 1 Januari 2010. Mayoritas wajib pajak di Indonesia adalah entitas yang masuk dalam kategori ETAP ini, yaitu entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan.

Menurut **Sukrisno Agoes** dalam buku auditing (edisi 4, 2012). Entitas dikategorikan tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

"Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelola usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. ''.

ETAP adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Misalnya pengguna eksternal dalam SAK ETAP ini adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit. Meskipun Otoritas Pajak (Direktorat Jenderal Pajak, Kemeterian

Keuangan RI) tidak disebutkan dalam SAK ini sebagai pengguna eksternal Laporan Keuangan, namun sejatinya DJP merupakan pengguna ekternal juga dari Laporan Keuangan ini karena seperti dijelaskan di atas, bahwa Laporan Keuangan merupakan dasar pembuatan SPT, dan membuat serta melaporkan SPT merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak. SAK ETAP merupakan SAK versi mudah yang ditujukan khusus untuk perusahaan kecil dan menengah (UKM) yang diadopsi dari IFRS for SME.

Dengan berlakunya secara Efektif SAK ETAP pada 1 Januari 2011, maka mayoritas wajib pajak di Indonesia harus menggunakan SAK ETAP ini untuk Laporan Keuangan tahun Pajak 2011. Jika suatu entitas Laporan Keuangannya mematuhi SAK ETAP ini, maka entitas tersebut harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh bahwa Laporan Keuangannya mematuhi SAK ETAP ini dalam catatan atas Laporan Keuangan (Paragraf 3.3). Lebih lanjut, masih dalam paragraf 3.3, dinyatakan bahwa Laporan Keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP.

2.1.4 Laporan Keuangan Nerca Berdasarkan SAK ETAP

Menurut **Iman Santoso** dalam buku Akuntansi Keuangan Menengah (2010):

“Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu – akhir periode pelaporan’’.

Neraca minimal mencakup pos-pos berikut:

(a) kas dan setara kas;

(b) piutang usaha dan piutang lainnya;

(c) persediaan;

(d) properti investasi;

(e) aset tetap;

(f) aset tidak berwujud;

(g) utang usaha dan utang lainnya;

(h) aset dan kewajiban pajak;

(i) kewajiban diestimasi;

(j) ekuitas.

Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas. SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan.

Entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca sesuai paragraf 4.6-4.9, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya.

Aset Lancar

Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika:

(a) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas;

(b) dimiliki untuk diperdagangkan;

(c) diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau

(d) berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai tidak lancar. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan.

Entitas mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek jika:

(a) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas;

(b) dimiliki untuk diperdagangkan;

(c) kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau

(d) entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Entitas mengklasifikasikan semua kewajiban lainnya sebagai kewajiban jangka panjang.

SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang akan disajikan. Paragraf 4.2 hanya menyediakan daftar pos-pos yang berbeda baik sifat atau fungsinya untuk menjamin penyajian yang terpisah dalam neraca. Sebagai tambahan:

(a) pos yang terpisah akan dibentuk jika ukuran, sifat, atau fungsi dari pos atau agregasi terhadap pos-pos yang serupa membuat penyajian terpisah menjadi relevan untuk memahami posisi keuangan entitas; dan

(b) uraian yang digunakan dan urutan pos-pos atau agregasi terhadap pos-pos yang sejenis mungkin diubah sesuai dengan sifat entitas dan transaksinya, untuk menyediakan informasi yang relevan dalam rangka memahami posisi keuangan entitas.

Pertimbangan atas pos-pos tambahan yang disajikan secara terpisah berdasarkan pada penilaian:

(a) sifat dan likuiditas aset;

(b) fungsi aset dalam entitas; dan

(c) jumlah, sifat dan waktu kewajiban.

Entitas mengungkapkan di neraca atau catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi berikut atas pos yang disajikan:

(a) kelompok aset tetap;

(b) jumlah piutang usaha, piutang dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, pelunasan dipercepat dan jumlah lainnya;

(c) persediaan yang menunjukkan secara terpisah jumlah dari:

(i) persediaan yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;

(ii) persediaan dalam proses produksi untuk penjualan tersebut;

(iii) bahan baku dan barang habis pakai yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa;

(d) kewajiban imbalan kerja dan kewajiban diestimasi lainnya;

(e) kelompok ekuitas, seperti modal disetor, tambahan modal disetor, agio saham, saldo laba, dan pendapatan dan beban yang diakui langsung ke ekuitas.

Entitas yang berbentuk Perseroan Terbatas mengungkapkan antara lain hal-hal berikut di neraca atau catatan atas laporan keuangan:

(a) untuk setiap kelompok modal saham:

(i) jumlah saham modal dasar;

(ii) jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh;

(iii) nilai nominal saham;

(iv) ikhtisar perubahan jumlah saham beredar;

(v) hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal;

(b) Penjelasan mengenai cadangan dalam ekuitas.

Entitas selain berbentuk Perseroan Terbatas, seperti persekutuan, mengungkapkan informasi yang setara seperti disyaratkan dalam paragraf 4.13(a), yang menunjukkan perubahan selama periode untuk setiap kategori ekuitas, serta hak, keistimewaan dan pembatasan untuk setiap kategori ekuitas.

2.1.5 Laporan Rugi Laba Berdasarkan SAK ETAP

Menurut **Mulyadi** dalam buku Akuntansi Keuangan Menengah (2011):

‘‘Laporan Rugi Laba mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya selama periode tersebut. Laporan Rugi Laba juga mengatur informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan bagaimana penyajiannya. Laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode’’.

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan (lihat Bab 9 Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan).

Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

(a) pendapatan;

(b) beban keuangan;

(c) bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas;

(d) beban pajak;

(e) laba atau rugi neto.

Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas.

Entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan.

Entitas menyajikan suatu analisis beban dalam suatu klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi beban dalam entitas, mana yang memberikan informasi yang lebih andal dan relevan.

Analisis Menggunakan Sifat Beban

(a) Berdasarkan metode ini, beban dikumpulkan dalam laporan laba rugi berdasarkan sifatnya (contoh, penyusutan, pembelian bahan baku, biaya transportasi, imbalan kerja dan biaya iklan), dan tidak dialokasikan kembali antara berbagai fungsi dalam entitas, Misalnya:

Pendapatan x

Pendapatan operasi lain x

Perubahan persediaan barang jadi dan barang dalam proses x

Bahan baku yang digunakan x

Beban pegawai x

Beban penyusutan dan amortisasi x

Beban operasi lainnya x

Jumlah beban operasi (x)

Laba operasi x

Analisis Menggunakan Fungsi Beban

(b) Berdasarkan metode ini, beban dikumpulkan sesuai fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan atau, sebagai contoh, biaya aktivitas distribusi atau aktivitas administrasi.

Sekurang-kurangnya, entitas harus mengungkapkan biaya penjualannya sesuai metode ini terpisah dari beban lainnya.

Misalnya:

Pendapatan x

Beban pokok penjualan (x)

Laba bruto x

Pendapatan operasi lainnya x

Beban pemasaran (x)

Beban umum dan administrasi (x)

Beban operasi lain (x)

Laba operasi x

Entitas dianjurkan untuk menyajikan analisis diatas pada laporan laba rugi. Entitas yang mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi mengungkapkan informasi tambahan berdasarkan sifat beban, termasuk penyusutan dan beban amortisasi dan beban imbalan kerja.

2.1.6 Laporan Perubahan Equitas dan Saldo Laba

Menurut **Iman Santoso** dalam buku Akuntansi Keuangan Menengah (2010):

‘‘Laporan Perubahan Equitas dan Laporan Rugi Laba dan Saldo Laba mengatur persyaratan untuk penyajian perubahan dalam ekuitas entitas selama suatu periode, baik dalam laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dan saldo laba (jika memenuhi kondisi tertentu)’’.

Tujuan Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut,

Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke, pemilik ekuitas selama periode tersebut. Informasi yang Disajikan di Laporan Perubahan Ekuitas

Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yangmenunjukkan:

(a) laba atau rugi untuk periode;

(b) pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;

(c) untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai Bab 9 Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan;

(d) untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah

perubahan yang berasal dari:

(i) laba atau rugi;

(ii) pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;

(iii) jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik

(iv) ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasuri, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.

Tujuan Laporan laba rugi dan saldo laba menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan. Paragraf 3.13 mengijinkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba menggantikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas jika perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi.

Informasi yang Disajikan di Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba

adalah Entitas menyajikan di laporan laba rugi dan saldo laba pos-pos berikut sebagai tambahan atas informasi yang disyaratkan dalam Bab 5 Laporan Laba Rugi:

(a) saldo laba pada awal periode pelaporan;

(b) dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode;

(c) penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode lalu;

(d) penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan akuntansi;

(e) saldo laba pada akhir periode pelaporan.

2.1.7 Laporan Arus Kas Berdasarkan SAK ETAP

Menurut **Syarief Basir** (2010):

‘‘Laporan Arus Kas mengatur informasi yang disajikan dalam laporan arus kas dan bagaimana penyajiannya. Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan’’.

Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas.

Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksidan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:

(a) penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa;

(b) penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain;

(c) pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;

(d) pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan;

(e) pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi;

(f) penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali.

Beberapa transaksi, seperti penjualan peralatan pabrik, dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian yang dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi. Tetapi, arus kas yang menyangkut transaksi tersebut merupakan arus kas dari aktivitas investasi.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah:

(a) pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset tetap yang dibangun sendiri), aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya;

(b) penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya;

(c) pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam joint venture (selain pembayaran untuk efek

yang diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan);

(d) penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain dan bunga dari joint venture (selainpenerimaan dari efek yang diklasifikasikan sebagai setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan);

(e) uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain;

(f) penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain;

Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:

(a) penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain;

(b) pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham entitas;

(c) penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya;

(d) pelunasan pinjaman;

(e) pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.

Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung. Dalam metode ini laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan

unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

Dalam metode tidak langsung, arus kas neto dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi dari dampak dari:

(a) perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode berjalan;

(b) pos non kas seperti penyusutan, penyisihan, dan keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi; dan

(c) semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan. Jumlah agregat arus kas yang berasal dari akuisisi dan pelepasan entitas anak atau unit usaha lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi.

Entitas mengungkapkan secara terpisah arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan. Entitas mengklasifikasikan arus kas secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan.

Entitas mengklasifikasikan bunga yang dibayarkan dan bunga dan dividen yang diterima sebagai arus kas operasi karena termasuk laba atau rugi. Sebagai alternatif, bunga yang dibayarkan dan bunga dan dividen yang diterima dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan dan arus kas investasi, karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan atau hasil investasi.

Dividen yang dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan. Sebagai alternatif, dividen yang dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai komponen arus kas dari aktivitas operasi karena dividen dibayarkan dari arus kas operasi.

Entitas mengungkapkan secara terpisah arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan dan mengklasifikasikannya sebagai arus kas aktivitas operasi, kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasikan dengan aktivitas pendanaan dan investasi. Jika arus kas pajak dialokasikan pada lebih dari satu jenis aktivitas, maka jumlah keseluruhan pajak yang dibayar harus diungkapkan.

Entitas mengeluarkan dari laporan arus kas, transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas. Entitas mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan keuangan sehingga memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut.

Banyak aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempunyai dampak langsung terhadap arus kas saat ini meskipun mempengaruhi struktur aset dan modal entitas. Tidak dimasukkannya transaksi non kas dalam laporan arus kas adalah konsisten dengan tujuan laporan arus kas sebab transaksi tersebut tidak mempengaruhi arus kas dalam periode berjalan. Contoh transaksi non kas adalah:

(a) perolehan aset secara kredit atau melalui sewa pembiayaan.

(b) akuisisi suatu entitas melalui emisi saham.

(c) konversi utang menjadi modal.

Entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas dan menyajikan rekonsiliasi jumlah yang dilaporkan dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang disajikan dalam neraca.

Entitas mengungkapkan, bersama dengan pendapat manajemen, jumlah kas dan setara kas yang signifikan yang dimiliki entitas, namun tidak dapat digunakan oleh entitas. Hal ini karena adanya pembatasan lalu lintas devisa atau pembatasan hokum

2.1.8 Catatan Atas Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

Menurut **SAK ETAP** (2009):

‘‘Bab ini mengatur prinsip yang mendasari informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dan bagaimana penyajiannya. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan’’.

Catatan atas laporan keuangan harus:

(a) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan paragraf 8.5 dan 8.6;

(b) mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan; dan

(c) memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

Secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

(a) suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP (lihat paragraf 3.3);

(b) ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan (lihat paragraf 8.5);

(c) informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.

(d) pengungkapan lain.

Dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan harus diungkapkan:

(a) dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;

(b) kebijakan akuntansi lain yang digunakan yang relevan untuk memahami laporan keuangan.

Entitas harus mengungkapkan pertimbangan secara terpisah dari hal-hal yang melibatkan estimasi (lihat paragraf 8.7) dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan atau catatan atas laporan keuangan lainnya yang digunakan manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan

mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Entitas harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tentang informasi mengenai asumsi pokok tentang masa depan dan sumber-sumber pokok lain untuk mengestimasi ketidakpastian pada akhir periode pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang menyebabkan adanya suatu penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan kewajiban dalam laporan keuangan tahun berikutnya. Terkait aset dan kewajiban tersebut, catatan atas laporan keuangan harus memasukkan rincian tentang:

(a) sifat; dan

(b) jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan.